

Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi

Dilla Janu Istanti

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

dillajanu1991@gmail.com

Abstrak

Dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia kerap kali mengalami perubahan. Perubahan kebijakan seringkali tanpa arah dan substansi yang jelas serta terukur. Pasca reformasi, kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan, Sistem kurikulum KBK pada tahun 2004 yang dirubah menjadi kurikulum KTSP pada tahun 2006. Kurikulum KTSP kemudian dirubah menjadi kurikulum 13 hingga wacana kurikulum nasional 2018. Hal ini menunjukkan perubahan kurikulum pendidikan merupakan dinamika kebijakan yang labil. Perubahan kebijakan kerap terjadi setiap ada pergantian rezim. Perubahan kebijakan kerap kehilangan makna dari kebijakan itu sendiri sebagai sarana untuk melakukan *problem solving* yang sifatnya lebih proaktif, adaptif, dan interpretatif. Hal ini yang kerap dikatakan bahwa kebijakan hanya menjadi sebuah hegemoni untuk mempertahankan kekuasaan terlihat dalam potret ini. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana dinamika perubahan kebijakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi.

Kata Kunci: Kebijakan; Kurikulum; KBK; KTSP

Abstract

The dynamics curriculum policy in indonesia often changed. A policy change often without direction and substance clear and measurable. After reform, education curriculum has been modified several changes, KBK curriculum in 2004 who changed to KTSP curriculum in 2006. Curriculum KTSP then turned into curriculum 13 to 2018 discourse national curriculum. This shows the curriculum change education is the unstable dynamics. A policy change often occurs every time there was a regime change. A policy change often lose significance of these itself as a means of solving a problem to do that would be more proactive, adaptive, and interpretive. This often said that the policies only into a hegemoni to keep power seen in this portrait. This essay will try to looked at how the dynamics a policy change in education curriculum in Indonesia following reform.

Keyword: Policy; Curicculum; KBK; KTSP

Pendahuluan

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Anastasia (2013) merupakan suatu proses yang memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang bertujuan memajukan dan mengembangkan kebudayaan. Menurut John Dewey *“Education is the fundamental method of social progress and reform. All reforms which rest simply upon the enactment of law, or the thereathenig of certain penalties, or upon changes in mechanical or outward arrangements, are transitory and futile,”*. (Tilaar. 1999)

Pendidikan adalah metode dasar kemajuan sosial dan reformasi. Semua reformasi yang sisanya hanya pada berlakunya hukum, atau memberlakukan denda tertentu, atau atas perubahan pengaturan mekanis atau luar, yang sementara dan sia-sia. Pendidikan dalam hal ini merupakan jalan emas untuk mencapai perdaban manusia yang lebih baik.

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat

konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan melalui perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal

sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter.

Pencapaian tujuan pendidikan nasional dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan terkait kurikulum yang menjadi standar proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Malcolm Skillbeck mengatakan bahwa *“Curriculum will be used to refer to the learning experiences of students, in so far as they are expressed on anticipated in goal and objectives, plans and design for learning and the implementation of these plans and design in school environments,”*. (Perdana, Dedi Ilham. 2013)

Kurikulum digunakan untuk acuan pengalaman pembelajaran siswa, diperlihatkan dalam pembentukan tujuan, rencana, dan rancangan untuk pembelajaran dan pengimplementasian dari rencana-rencana tersebut dan rancangan dalam lingkungan sekolah.

Kurikulum dalam praktik di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah berkembang dalam beberapa kali namun landasan filsafat yang

digunakan jarang digali. Landasan filsafat yang digunakan menjadi pemikiran menarik karena dengan landasan filsafat yang jelas maka arah dan tujuan pendidikan menjadi jelas. Kurikulum terkadang kerap menjadi seperti 'gado-gado' yang harus diolah sedemikian rupa sehingga semua aspek, baik itu pemerintah, guru, peserta didik mau dan mampu mengimplementasikannya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kurikulum pendidikan mengalami perubahan yang amat sering tanpa rentan waktu yang jelas. Dinamika kebijakan yang terjadi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia terlihat seperti potret dinamika kebijakana yang labil. Kebijakan labil karena terlalu sering mengalami perubahan tanpa arah dan substansi yang jelas serta terukur. Perubahan kebijakan ditentukan oleh banyak factor yang mendorong terjadinya perubahan.

Petters dalam buku *why does public policy change* menyatakan konsep *Four I* yang mempengaruhi perubahan kebijakan. Konsep *four* tersebut ialah *individu, Idea, Interest,*

and Institution. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana dinamika perubahan kebijakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan bagaimana factor *Four I* dalam mempengaruhi dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia pasca reformasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kesiapan peneliti untuk memasuki wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.

Selain itu dalam memandang realitas, peneliti kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan, variabel-variabel penelitian. Walaupun dapat dipisah-pisahkan variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrument penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”. Jadi peneliti adalah merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Pembahasan

Ragam Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu (Titmuss. 1974).

Kebijaksanaan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Chief J.O. Udoji . 1981).

Kebijakan publik ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan merupakan gagasan pengaturan organisasi dan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga dalam usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuannya (Syarifudin. 2008).

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan merupakan aturan tertulis atas keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Abidin. 2006).

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif sehingga kebijakansifatnya lebih adaptif dan interpratatif (Dunn. 2008).

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan (*policy making*). Dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making*) terlihat sebagai adanya

bagian - bagian yang berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya sebuahkebijakanorgani sasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi.

Konsep Dinamika Kebijakan

Dinamika merupakan suatu hal yang didalamnya terdapat tenaga, kekuatan, bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Menurut Kartono

dinamika berarti perubahan baik dalam bentuk besar-besaran maupun kecil-kecilan, secara cepat maupun lambat, yang sifatnya dan berhubungan dengan suatu kondisi tertentu (Widan Zulkarnai. 2013).

Dinamika kebijakan publik berarti memahami perubahan kebijakan pada perumusan kebijakan dan proses implementasi kebijakan. Tidak semua sistem itu dinamis, tapi dinamika bisa terjadi dalam suatu sistem. Dinamika terjadi sebagai langkah melakukan keseimbangan didalam elemen kebijakan. Kebijakan public selalu memiliki momentum untuk melakukan perubahan dalam rangka pencapaian tujuan.

Sistem sebagai serangkaian unit elemen yang saling berhubungan sehingga perubahan dalam satu elemen akan merubah keseluruhan sistem tersebut. Terkait dengan dinamika, terdapat sistem yang terbuka sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup yakni sistem yang responsif terhadap perubahan yang diawali dari dalam sistem itu sendiri. Sistem yang terbuka ialah sistem yang reponsif tidak hanya dari

dalam tetapi juga dari lingkungan di sekitarnya. Dinamika kebijakan publik dapat dipahami sebagai system yang responsive terhadap kondisi lingkungan yang menjadi pemicu suatu perubahan dan terjadinya dinamika dalam perbahan kebijakan yang ada (Robert Jervis. 1997).

Konsep Four I dalam Dinamikan Kebijakan

Proses perubahan kebijakan dalam buku *why policy does public policy changed* dipengaruhi oleh faktor Empat I, yaitu: idea, interest, intitution, dan individual (Petters. 1996).

Individu

Individu adalah agen perubahan kebijakan itu sendiri. Individu memiliki peranan yang cukup penting karena individu memiliki kapasitas untuk menemukan ide-ide baru dan memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah institusi atau lembaga. Individu memiliki kemampuan unuk menyampaikan ide-ide baru ke dalam sebuah kebijakan. Individu

memiliki kemampuan mobilisasi untuk menyampaikan ide-ide agar masuk pada sebuah kebijakan.

Ide dan Individu

Ide adalah hasil pemikiran individu yang dapat merubah wacana kebijakan. Setiap ide yang dihasilkan oleh individu selalu melekat didalamnya kepentingan tertentu, hingga pada akhirnya ide juga membentuk kelompok kepentingan. Point penting dalam analisis perubahan kebijakan adalah sejauh mana ide-ide baru dapat masuk suatu sektor kebijakan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Kepentingan

Interest atau kepentingan selalu melekat pada setiap ide yang akan diwacanakan menjadi sebuah kebijakan. Tidak ada ide yang didalamnya tidak mengandung unsur kepentingan. Hal ini sejalan dengan tujuan manusia itu sendiri berada didalam sebuah lembaga atau masyarakat memiliki tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui

kebijakan yang didalamnya selalu mengandung kepentingan. Policy termination selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, ideologi, kepentingan publik, opini publik. Kebijakan tidak ada yang bebas nilai, kebijakan selalu mengandung kepentingan didalamnya.

Lembaga

Goldsten mengatakan lembaga mencerminkan seperangkat gagasan dominan yang diterjemahkan melalui mekanisme hukum kedalam organisasi pemerintahan formal. Sebuah ide akan memiliki dampak pada kebijakan ketika ide tersebut terbungkus prosedur hukum sehingga dapat diaplikasikan pada sebuah kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa institusi dan ide adalah alat perubahan.

Perubahan kebijakan dalam paparan diatas dapat disimpulkan sangat dipengaruhi oleh faktor ide, kepentingan, institusi, dan individu. Keempat hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam proses perubahan sebuah kebijakan.

Selain faktor empati tersebut, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan adalah waktu. Waktu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perubahan kebijakan.

Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

“ A Curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”. Kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan (George A. Beauchamp. 1986) .

Kurikulum menurut UU Nomor 20 Pasal 1 butir 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum yang paling terkenal mulai dari istilah CBSA

(cara belajar siswa aktif), KBK (kurikulum berbasis kompetensi), serta KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) bahkan saat ini muncul kurikulum 2013. Pemerhati pendidikan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Slamet Sutrisno menyatakan bahwa pergantian kurikulum sangat sering dilakukan setiap pergantian rezim berkuasa (Maf, 2013).

Hal ini kerap menimbulkan anggapan dari beberapa pihak anekdot berupa ganti menteri, ganti kurikulum. Pergantian Menteri selalu membawa paket baru pada masa kepemimpinannya. Sentimen tersebut semakin memperkuat argumen masyarakat bahwa tiap kali ada pergantian kabinet selalu memunculkan polemik baru di kalangan insan pendidikan dan masyarakat umum, selalu terjadi transisi budaya yang dibawa tiap kali ada perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah yang menjabat saat itu.

Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi dalam kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pergantian kerap terjadi

setiap ada pergantian rezim. Perubahan kebijakan kerap kehilangan makna dari dari kebijakan itu sendiri sebagai sarana untuk melakukan *problem solving* yang sifatnya lebih proaktif, adaptif, dan interpretatif. Perubahan kebijakan yang terjadi tanpa evaluasi dan kajian yang mendalam dapat dipahami hanya sebagai ajang untuk menunjukkan *potitioning* pemegang kekuasaan sehingga ganti rezim ganti kebijakan. Hal ini terlihat misalnya dari system kurikulum KBK pada tahun 2004 yang diubah menjadi kurikulum KTSP pada tahun 2006. Rentang waktu yang hanya berkisar 2 tahun kurikulum sudah berubah. Kemudian perubahan kurikulum ini juga dilakukan tanpa evaluasi kurikulum yang jelas. Kurikulum KTSP kemudian diubah menjadi kurikulum 13. Kurikulum 13 sejak rentang waktu 4 (empat) tahun dalam pengesahannya masih dalam tahap sosialisasi. Hal ini menunjukkan perubahan kurikulum pendidikan merupakan dinamika kebijakan yang labil. Hal ini yang kerap dikatakan bahwa kebijakan

hanya menjadi sebuah hegemoni untuk mempertahankan kekuasaan terlihat dalam potret ini.

Kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pengembangan dan perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena kurikulum bukanlah sebuah konsep statis. Kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pada prinsipnya kurikulum akan selalu mengalami perubahan dan proses berkelanjutan (*change and continuity*).

Perubahan kurikulum di Indonesia mengalami dinamika cukup sering. Hal ini terlihat dari pergantian kurikulum yang kerap terjadi dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari pasca reformasi saja perubahan kurikulum sudah terjadi hingga beberapa kali. Setiap pergantian rezim yang berkuasa selalu menghasilkan produk kurikulum pendidikan. Berikut perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi pasca reformasi.

Tabel 1. Tabel Dinamika Kebijakan Kurikulum di Indonesia Pasca Reformasi

No	Tahun	Regulasi	Tentang
1.	2004	TAB MPR No.IV/MPR/1999/BAB IV.E, GBHN (1999-2004, UU No.22 Tahun 1999, dan PP No. 25 Tahun 2000.	KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Pada kurikulum ini suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
2.	2006	UU No.20 Tahun 2003 dan PP no 19 Tahun 2005.	Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Pada kurikulum pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat.
3.	2013	Permendikbud No.54 tahun 2013	Kurikulum 2013 disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki

			kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik.
--	--	--	---

Sudah ada tiga (3) kali pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum mulai dari kurikulum 2004 yang dikenal dengan kurikulum KBK, kemudian berganti menjadi kurikulum KTSP, dan kini diterapkan kurikulum 2013.

Analisis Konsep *Four I* Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Meminjam konsep *Four I* dalam proses perubahan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia, maka perubahan kebijakan dapat dianalisis dari faktor *Four I*, yaitu : *idea, interest, intitution, dan individual*.

Individu

Individu adalah agen perubahan kebijakan (*agent of policy*). Perubahan kurikulum pendidikan di Indoensia sangat dipengaruhi oleh faktor individu. Perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya individu yang menghasilkan ide dan menjadi aktor

penggerak perubahan. Pada perubahan kebijakan kurikulum pendidikan yang terjadi di Indonesia individu memiliki peranan yang cukup penting. Hal inidikarenakan individu memiliki kapasitas untuk menemukan ide - ide baru di dalam kurikulum pendidikan. Individu memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide-ide baru ke dalam sebuah kebijakan. Individu juga memiliki kemampuan mobilisasi untuk menyampaikan ide-ide agar masuk pada sebuah kebijakan. Individu dalam hal ini adalah aktor yang ada dibalik terjadinya sebuah perubahan kebijakan. Pada kebijakan kurikulum pendidikan ini individu yang sangat berperan sebagai penggerak perubahan kebijakan adalah pemegang kekuasaan pada saat itu.

Pada tabel dinamika kebijakan tersebut sangat terlihat jelas bahwa perubahan kebijakan kurikulum pendidikan kerap dilakukan setiap ada pergantian rezim kekuasaan. Misalnya pada

masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ada perubahan kurikulum 1994 diganti menjadi kurikulum KBK. Kurikulum KBK pada yang baru diterapkan pada tahun 2004 kembali diganti pada tahun 2006. Pada tahun 2006 adalah masa pemerinyahan SBY Jilid 1. Kurikulum KBK pada saat itu baru dijalankan selama 2 tahun, tetapi sudah muncul regulasi baru untuk mengubah kurikulum KBK menjadi KTSP. Kurikulum KTSP diakhir Pemerintahan SBY Jilid 2 diganti dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang baruu berjalan 1 tahun, pada tahun 2014 di masa pemerintah Jokowi mulai dikiritik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh Anies Baswedan. Anies menilai kurikulum 2013 kurang efektif dan mewacanakan kedepannya untuk mengganti kurikulum 2013 dengan kurikulum nasional 2018. Perubahan yang terjadi disetiap pergantian kekuasaan ini menunjukkan adanya individu yang sangat berperan sebagai aktor untuk merubah kebijakan. Aktor dalam hal ini biasanya didominasi oleh kelompok yang berkuasa.

Ide

Ide adalah hasil pemikiran individu yang dapat menghasilkan wacana kebijakan dan pada akhirnya akan merubah sebuah kebijakan. Point penting dalam perubahan kebijakan adalah sejauh mana ide-ide baru dapat masuk suatu sektor kebijakan. Pada perubahan kebijakan kurikulum ini ide merupakan hasil pemikiran individu sebagai respon atas kebutuhan publik yang terus mengalami perkembangan. Kebutuhan publik yang mengalami perkembangan pada akhirnya menuntut munculnya ide-ide baru yang dapat merespon pemenuhan kebutuhan pulik.

Secara filosofis ide yang muncul terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan adalah untuk mencapai tercapainya tujuan besar pendidikan sebagai amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara sosiologis, dalam perkembangan masyarakat modern kini, pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan era globalisasi. Pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini yang pada akhirnya

memunculkan ide untuk mengubah substansi kurikulum pendidikan sesuai dengan tantangan saat ini.

Pada kenyataannya ide yang akan dituangkan menjadi sebuah kebijakan tidak memulu bersubstansi *problem solving* terhadap masalah yang ada. Ide kerap muncul hanya sebagai kepentingan dari aktor yang memunculkan ide itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan kebijakan tidak pernah bebas nilai. Kebijakan selalu bernuansa kepentingan politis untuk elite atau sekelompok orang. Pada akhirnya, ide tidak melulu soal filosofis dan sosiologis, tetapi juga soal politis.

Kepentingan

Kepentingan dalam dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia sangat terlihat jelas. Kepentingan terlihat sangat melekat di dalam perubahan kebijakan yang terjadi. Hal ini terlihat dari kebijakan yang terus berubah-ubah dalam setiap pergantian rezim. Setiap rezim yang berkuasa selalu merubah kebijakan pada rezim sebelumnya. Setiap kekuasaan selalu melahirkan kurikulum pendidikan

yang baru. Pergantian kurikulum ini memuat unsur politis yaitu pencitraan melalui produk kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah produk rezim yang berkuasa.

Rezim yang berkuasa seolah ingin menunjukkan *standing position* bahwa mereka mampu menghasilkan produk kurikulum. Hal ini terlihat jelas dari dinamika perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi. Pemerintahan Megawati menghasilkan kurikulum KBK, Pemerintahan SBY menghasilkan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pemerintahan Jokowi di tahun awal pemerintahannya sudah mewacanakan pergantian kurikulum pendidikan nasional di 2018. Hal ini menunjukkan betapa kurikulum pendidikan di Indonesia sangat sarat dengan kepentingan politik. Hal ini dipertegas dengan permasalahan kurikulum pendidikan yang kerap terjadi. Misalnya mulai dari implementasi yang sulit untuk dilakukan. Pergantian kebijakan dengan begitu mudahnya diubah, dan setelahnya dalam jangka waktu yang relatif singkat sudah kembali diragukan efektifitasnya dan muncul

wacana untuk merubah kembali. Hal ini menunjukkan kajian pada kebijakan tersebut tidak dilakukan secara mendalam, tetapi ajang untuk memperlihatkan *standing position* penguasa.

Lembaga

Pada kebijakan perubahan kurikulum pendidikan, peran institusi sebagai lembaga untuk menjadi wadah untuk membuat ide yang dihasilkan individu menjadi sebuah kebijakan menjadi penting. Pada tingkat nasional pihak Pemerintah dan DPR melakukan penggodokan ide hingga kemudian menjadi sebuah keputusan kebijakan yang legal formal dan dapat diimplementasikan.

Kesimpulan

Kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi mengalami dinamika perubahan yang cukup besar. Dinamika perubahan kebijakan terjadi disetiap pergantian rezim kekuasaan. Dinamika perubahan yang terlalu sering pada kurikulum pendidikan dapat menghasilkan slogan baru "*ganti rezim ganti*

kurikulum". Hal ini sejalan dengan produk kurikulum yang selalu dihasilkan oleh setiap rezim yang berkuasa. Perubahan kebijakan dari kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013, hingga wacana kurikulum nasional 2018 secara rentan waktu perubahan sangat dinamis. Kebijakan kurikulum yang terlalu sering berubah-ubah tanpa rentan waktu yang pasti, bahkan ada yang hanya beberapa tahun saja kembali diganti dengan kebijakan yang baru karena permasalahan sulitnya untuk diimplementasikan atau kurang dari sisi efektifitasnya.

Perubahan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan kebijakan setidaknya dipengaruhi oleh faktor individu, ide, kepentingan dan institusi. Keempat hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam proses perubahan sebuah kebijakan. Pemaparan dari bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari keempat faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam perubahan kebijakan kurikulum pendidikan adalah faktor individu dan

kepentingan. Perubahan kebijakan kerap kehilangan esensinya sebagai *problem solving* kepentingan masyarakat yang harus diakomodir. Kebijakan kerap ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang bernuansa politis. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat untuk diimplementasikan tidak bebas nilai. Kebijakan selalu melekat kepentingan didalamnya. Pada perubahan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia individu sebagai aktor penggerak perubahan juga menjadi kunci penting terjadinya dinamika kebijakan kurikulum pendidikan.

Kebijakan secara substansi dilamnya terdapat tujuan yang ingin dicapai dan *problem solving* terhadap permasalahan publik. Kebijakan harusnya tepat sasaran untuk tercapainya tujuan. Kebijakan adar dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran pada tujuan yang ingin dicapai dapat dilakukan dengan menguapayakan beberapa hal. *Pertama*, harus ada *political will* dari para elite pemegang kekuasaan. *Political will* yang baik menjadi sangat penting karena kebijakan

adalah produk dari proses komitmen para elite pemegang kekuasaan. *Kedua*, melibatkan para *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan akan tepat sasaran dan dapat lebih mudah untuk diimplementasikan jika dirumuskan bersama *stakeholder* terkait. *Ketiga*, kebijakan harusnya dibuat melalui kajian secara mendalam. Kajian harus melibatkan para ahli dan akademisi. Kajian secara mendalam terkait suatu kebijakan akan berpengaruh pada efektifnya implementasi kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas.
- Anastasia, Dansy Novitasari, (2013). *Metode pembelajaran akhlak menurut K.H. Ahmad Dahlan dan relevansinya dengan pembelajaran akhlak dalam Islam*. urusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Dedi Ilham. (2013). *Kurikulum Dan Pendidikan di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan Yang Ideal Di Indonesia Atau Hegemoni Kepentingan Penguasa*

- Semata?*. Jurnal: Pemikiran Sosiologi 2 (1), hlm. 63-74.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta : Universitas Gajah Mada.
- Petters. (1996). *Why Does Public Policy Change*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tilaar. (1999). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remadja.
- UU Nomor 20 Pasal 1 butir 19 Tahun 2003
- Permendikbud No.54 tahun 2013
- TAB MPR No.IV/MPR/1999/BAB IV.E, GBHN 1999- 2004, UU No.22 Tahun 1999, dan PP No. 25 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- UU No.20 Tahun 2003 dan PP no 19 Tahun 2005.
- Beauchamp, George. (1986) dalam *Penjelasan Kurikulum 1975*. Diakses dari <http://umamatematika.blogspot.com/2015/05/kurikulum-1975.html> pada 12 November 2013 pkl 11.17 Wib.
- Jervis. (1997). Dalam *Dinamika Kebijakan Publik*. Diakses dari <http://jurnalphobia.blogspot.com/2012/04/dinamika-kebijakan-publik.html> pada 12 Novemver 2018, pkl 07.39.
- Rosdakarya. <https://www.rijal09.com/2016/03/kebijakan-pendidikan.html> diakses pada 12 November 2012 pkl 04.56.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta dalam Thimus. 1974. Dalam Wahyudianto, Eko. *Pengantar Teori Kebijakan*. Diakses dari <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html> pada 12 November 2018 pkl. 11.29 Wib.
- Udoji, Chief. (1981). Dalam *Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Diakses dari <https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/> pada 12 November 2018, pkl. 11.34 Wib.
- Zulkarnain, Wildan. (2013). Dalam *Pengertian Dinamika Menurut Para Ahli*. Diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamika-menurut-para-ahli/> pada 12 November 2013, Pkl. 11.47 Wib.